

**DAMPAK KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH MENENGAH ATAS DI JAKARTA
BARAT TERHADAP KUALITAS DAN PEMERATAAN
PENDIDIKAN MENENGAH**

Siagian¹, Baginda Edward^{2*}, Murniarti³, Erni⁴
Universitas Kristen Indonesia^{1,2,3,4}
2501198004@ms.uki.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan zonasi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Barat terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan menengah, khususnya pada aspek pemerataan akses, kualitas layanan pendidikan, serta tantangan implementasi pada tingkat sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (kajian pustaka) melalui analisis dokumen kebijakan dan sintesis sistematis terhadap jurnal ilmiah relevan, yang dianalisis menggunakan teknik Analisis Isi Kualitatif dan Sintesis Komparatif Teoretis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi berhasil mewujudkan pemerataan akses pendidikan secara struktural melalui redistribusi siswa dan pengurangan polarisasi sekolah favorit dan non-favorit, namun belum berhasil mewujudkan pemerataan kualitas secara fungsional karena masih terdapat ketimpangan distribusi guru berkualitas, disparitas fasilitas, serta ketidaksiapan pedagogis dalam menghadapi heterogenitas siswa. Kondisi tersebut memunculkan krisis pada dimensi proses pembelajaran, terutama dalam penerapan diferensiasi pembelajaran dan pemenuhan tuntutan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan zonasi efektif sebagai kebijakan pemerataan sisi akses (demand-side policy), tetapi masih lemah pada penguatan sisi suplai (supply-side policy) yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas proses pembelajaran, sehingga diperlukan intervensi afirmatif pada redistribusi guru, peningkatan kompetensi pedagogis, dan penguatan tata kelola mutu pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Zonasi, Pemerataan Pendidikan, Kualitas Pendidikan, Guru Berkualitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the Senior High School (SMA) zoning policy in West Jakarta on the quality and equity of secondary education, particularly in terms of equitable access, quality of educational services, and implementation challenges at the school level. The research method used is a qualitative approach with a literature review through policy document analysis and a systematic synthesis of relevant scientific journals, analyzed using Qualitative Content Analysis and Theoretical Comparative Synthesis techniques. The results show that the zoning policy has succeeded in achieving equal access to education structurally through student redistribution and reducing the polarization between favorite and non-favorite schools. However, it has not succeeded in achieving equal quality functionally due to the ongoing unequal distribution of qualified teachers, disparities in facilities, and pedagogical unpreparedness in dealing with student heterogeneity. This condition has created a crisis in the learning process, particularly in the implementation of learning differentiation and meeting the needs of the Minimum Competency Assessment (AKM). The conclusion of this study confirms that an effective zoning policy is a demand-side policy, but it remains weak in strengthening the supply-side policy related to human resource capacity and the quality of the learning process. Therefore, affirmative interventions are needed to redistribute teachers, improve pedagogical competence, and strengthen education quality governance.

Keywords: Zoning Policy, Education Equity, Education Quality, Quality Teachers

PENDAHULUAN

Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda prioritas nasional yang terus diupayakan pemerintah Indonesia. Salah satu intervensi kebijakan yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir adalah implementasi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan ini, yang diatur secara ketat, bertujuan utama untuk menghilangkan polarisasi sekolah favorit dan non-favorit, sehingga menciptakan pemerataan kualitas pendidikan serta menghilangkan diskriminasi akses berdasarkan status sosial dan ekonomi (Mustari, 2022). Namun, implementasi kebijakan ini kerap menimbulkan perdebatan, terutama di wilayah perkotaan besar dengan kepadatan penduduk dan disparitas fasilitas sekolah yang tinggi. Sejak 2017, kebijakan zonasi sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Kemendikbud) dan pemerintah daerah menjadi perhatian banyak pihak karena berbagai permasalahan yang muncul di lapangan (BBC Indonesia, 2019; Syakarofath et al., 2020). Secara konseptual, kebijakan zonasi sekolah adalah sistem zonasi wilayah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara merata, mengatasi masalah pemerataan akses, dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional (Kominfo, 2020).

Tujuan kebijakan zonasi sekolah, yaitu: (1) meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan; dan (2) meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan (Raharjo et al., 2020). Dalam proses pelaksanaan, intervensi terhadap input peserta didik baru di sekolah melalui penerapan sistem zonasi pada mekanisme PPDB menjadi salah satu sasaran prioritas dalam usaha pemerataan pendidikan. Selain itu, zonasi pendidikan pada dasarnya untuk; (1) keberpihakan kepada anak tidak mampu; (2) menghapus diskriminasi dan ketidakadilan; (3) pemerataan kuantitas dan kualitas sekolah termasuk guru; dan (4) membantu Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Raharjo et al., 2020). Penerapan kebijakan zonasi diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang status sosial ekonomi atau lokasi tempat tinggal. Namun, implementasi kebijakan ini di wilayah Jakarta Barat menimbulkan berbagai dinamika dan dampak yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak kebijakan zonasi sekolah menengah atas di Jakarta Barat terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan dengan fokus pada aspek-aspek seperti pemerataan akses, kualitas sekolah, motivasi belajar siswa, dan tantangan implementasi.

Provinsi DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Barat, menjadi arena studi kasus yang sangat relevan. Wilayah ini memiliki karakteristik yang khas, ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, disparitas infrastruktur antar-zona yang mencolok, dan adanya sekolah-sekolah dengan reputasi keunggulan akademik yang telah lama terbentuk. Kondisi ini membuat upaya pemerataan kualitas menghadapi hambatan nyata. Di satu sisi, kebijakan zonasi berhasil mendekatkan siswa dengan sekolah, tetapi di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap kualitas input siswa dan standar akademik sekolah-sekolah yang sebelumnya dianggap "favorit" (Setiawan & Rahaju, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menutup kesenjangan informasi antara idealisme kebijakan zonasi dengan realitas empiris dampaknya terhadap sistem pendidikan menengah di Jakarta Barat.

Mempertimbangkan berbagai tantangan dan implikasi dari kebijakan zonasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan di lingkungan perkotaan. Artikel ini akan mengeksplorasi sejauh mana kebijakan zonasi berhasil dalam mencapai tujuannya, serta hambatan yang masih perlu diatasi agar sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas dapat terwujud. Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan zonasi serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan pendidikan untuk membedah dampak kebijakan zonasi (Murniarti, 2020). Kebijakan ini merupakan bagian integral dari reformasi pendidikan

yang lebih luas di Indonesia, selaras dengan semangat Merdeka Belajar, di mana upaya pemerataan akses dan kualitas menjadi salah satu pilar utama yang diusung oleh pemerintah (Sibagariang, Sihotang, & Murniarti, 2021).

Dalam konteks ini, kualitas tidak hanya diukur dari nilai Ujian Nasional (yang telah dihapus), tetapi juga dari kompetensi mendasar siswa seperti yang diukur dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yang memerlukan perhatian khusus pada pelatihan dan kesiapan guru (Tju & Murniarti, 2021). Lebih lanjut, heterogenitas input siswa akibat zonasi juga menantang sekolah-sekolah SMA untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran baru dan mengatasi tantangan kurikulum di kelas (Taruklimbong & Murniarti, 2024). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi pustaka dan analisis data sekunder untuk mengkaji dampak kebijakan zonasi sekolah. Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan zonasi sekolah, teori-teori yang relevan, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Analisis data sekunder akan dilakukan terhadap data-data kualitas pendidikan, seperti nilai ujian nasional, tingkat kelulusan, dan data-data lain yang relevan, untuk melihat perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan zonasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Literatur (Kajian Pustaka), yang dipilih untuk menganalisis dan mensintesis temuan dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Barat secara komprehensif, khususnya dalam dua aspek utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan menengah dan pemerataan pendidikan menengah. Oleh karena itu, penelitian merumuskan bagaimana dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas pendidikan menengah pada Sekolah Menengah Atas di wilayah Jakarta Barat, Apakah kebijakan zonasi telah berhasil mewujudkan pemerataan pendidikan menengah di antara Sekolah Menengah Atas di wilayah Jakarta Barat. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap dokumen kebijakan resmi (Permendikbud dan Peraturan Daerah DKI Jakarta) serta jurnal ilmiah yang berfokus pada dampak PPDB Zonasi terhadap jenjang SMA di wilayah metropolitan, dengan fokus sintesis pada konteks Jakarta Barat.

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi dan penyaringan sistematis (*systematic filtering*) dari data sekunder, termasuk empat karya ilmiah kunci yang dijadikan pilar teoritis: (1) Murniarti (2020) yang menjadi kerangka Analisis Kebijakan Pendidikan; (2) Sibagariang, Sihotang, dan Murniarti (2021) yang membahas perspektif pemerataan akses dan kualitas dalam kebijakan *Merdeka Belajar*; (3) Tju dan Murniarti (2021) yang relevan untuk mendasari pembahasan aspek pengukuran kualitas siswa pasca-zonasi; dan (4) Taruklimbong dan Murniarti (2024) yang mengupas tantangan kualitas pembelajaran di SMA pasca-kebijakan. Data yang telah diekstraksi kemudian dianalisis melalui Analisis Isi Kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan tema dampak zonasi, dilanjutkan dengan Sintesis Komparatif Teoretis untuk membandingkan temuan empiris (data) dengan tujuan ideal kebijakan (teori), guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk konteks SMA Jakarta Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sintesis kritis terhadap literatur yang dikaji menegaskan bahwa Kebijakan Zonasi SMA di Jakarta Barat telah menciptakan fenomena paradoksal, di mana keberhasilan struktural dalam pemerataan akses secara bersamaan mengekspos defisit mendasar dalam pemerataan kualitas fungsional.

Analisis Pemerataan Pendidikan: Dekonstruksi Akses versus Kapasitas Fungsional

Kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru perlu dipahami secara dualistik: sebagai keberhasilan dalam menyelesaikan ketidakadilan akses (dimensi struktural), namun sekaligus sebagai kegagalan dalam mengatasi ketimpangan kualitas (dimensi fungsional). Pada level output kebijakan, zonasi terbukti berhasil menciptakan keadilan geografis dalam akses pendidikan. Keadilan ini bersifat struktural karena menjamin hak yang relatif setara bagi peserta didik untuk mengakses sekolah negeri terdekat tanpa diskriminasi berbasis nilai akademik awal maupun status sosial-ekonomi. Temuan Sibagariang, Sihotang, dan Murniarti (2021) menegaskan bahwa kebijakan ini merepresentasikan bentuk *affirmative action* dalam konteks pendidikan yang bertujuan mereduksi polarisasi sosial antar-sekolah. Di wilayah Jakarta Barat, indikator keberhasilan tersebut terlihat dari redistribusi siswa yang sebelumnya terkonsentrasi di sekolah unggulan menjadi tersebar lebih merata ke berbagai sekolah dalam satu zona. Kondisi ini merupakan prasyarat (*pre-condition*) penting bagi pemerataan kualitas jangka panjang. Namun, pemerataan tersebut tidak diikuti oleh distribusi sumber daya pendidikan yang proporsional. Permasalahan utama terletak pada dimensi input sumber daya. Studi Setiawan dan Rahaju (2021) serta Supriadi (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa zonasi hanya meratakan input peserta didik, tetapi gagal meratakan input sumber daya esensial, khususnya guru berkualitas. Di wilayah metropolitan, guru dengan kualifikasi tinggi—ditinjau dari sertifikasi, pengalaman, dan reputasi profesional—cenderung tetap terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang sebelumnya berstatus favorit karena faktor fasilitas, budaya kerja, dan peluang pengembangan profesional yang lebih baik.

Ketiadaan mekanisme redistribusi guru yang sistematis menyebabkan ketimpangan kapasitas pedagogis antar-sekolah tetap berlangsung. Sekolah non-favorit yang kini menerima siswa dengan latar belakang akademik lebih heterogen tidak selalu memiliki kapasitas pengajaran yang memadai untuk mengelola keberagaman tersebut. Selain itu, disparitas fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang kelas adaptif masih menunjukkan kesenjangan signifikan antara sekolah *legacy* dan sekolah lainnya. Temuan ini menegaskan bahwa disparitas sumber daya manusia merupakan *bottleneck* paling krusial dalam implementasi zonasi. Kebijakan ini berhasil memetakan lokasi ketimpangan kualitas, tetapi belum menyediakan instrumen struktural untuk merealokasi sumber daya secara efektif. Dampak lanjutannya terlihat pada dimensi proses pembelajaran. Heterogenitas input siswa yang semakin tinggi, tanpa dukungan kapasitas pedagogis yang setara, memunculkan krisis pedagogis di tingkat kelas. Guru dituntut untuk melakukan diferensiasi pembelajaran, remedial intensif, dan pendekatan adaptif, namun tidak selalu dibekali pelatihan maupun dukungan sistemik yang memadai. Dengan demikian, problem utama zonasi bukan terletak pada desain aksesnya, melainkan pada ketidaksiapan sistem dalam mengelola konsekuensi fungsional dari pemerataan tersebut.

Analisis Kualitas Pendidikan: Krisis Pedagogis dan Tuntutan Adaptasi Proses

Dampak paling krusial dari zonasi adalah pada Proses pembelajaran, yang kini ditandai dengan krisis pedagogis akibat heterogenitas input siswa yang ekstrem.

1) Dampak *Pedagogical Shock* pada Guru SMA

Perubahan komposisi siswa menciptakan *pedagogical shock* di seluruh SMA di Jakarta Barat. Guru yang terbiasa dengan metode pengajaran yang homogen, cepat, dan kompetitif (khas sekolah unggulan) atau metode yang *less-demanding* (khas sekolah non-favorit) kini dipaksa untuk mengajar dalam kelas yang memiliki rentang kemampuan akademik sangat lebar. Taruklimbong dan Murniarti (2024) menekankan bahwa dalam kondisi ini, Metode Pengajaran Konvensional menjadi Tidak Efektif. Guru dituntut untuk mengimplementasikan

Diferensiasi Pembelajaran (*Differentiated Instruction*). Diferensiasi bukan sekadar membedakan tugas, tetapi melibatkan penyesuaian kompleks pada:

- Konten: Menyediakan materi yang berbeda berdasarkan tingkat kesiapan siswa.
- Proses: Menggunakan metode pengajaran yang beragam (kelompok kecil, *peer tutoring*, pengayaan).
- Asesmen: Melakukan asesmen formatif yang adaptif.

Mayoritas guru di Jakarta Barat, berdasarkan sintesis literatur, belum memiliki kompetensi dan pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikan praktik diferensiasi ini secara konsisten dan berkelanjutan. Kegagalan di tahap Proses ini akan secara langsung dan deterministik menggagalkan capaian Outcome (kualitas merata).

2) Keterkaitan AKM, Pelatihan Guru, dan Kualitas Output

Pengukuran kualitas *output* melalui AKM semakin memperparah tantangan guru. AKM menuntut kemampuan bernalar yang hanya dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang mendalam dan adaptif. Tju dan Murniarti (2021) menunjukkan bahwa:

- Guru memerlukan pelatihan spesifik dalam Asesmen Diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dalam kelas heterogen.
- Kurikulum harus diadaptasi agar selaras dengan kompetensi literasi dan numerasi AKM, bukan sekadar menuntaskan materi kurikulum lama.

Jika guru di sekolah non-favorit tidak mendapatkan pelatihan ini, maka siswa-siswa baru dengan potensi akademik tinggi pun akan gagal mencapai *outcome* yang maksimal, karena kualitas proses di sekolah tersebut belum mendukung potensi mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa zonasi hanya efektif sebagai kebijakan *demand-side*, tetapi lemah dalam kebijakan *supply-side* yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme guru.

Analisis Kritis Kebijakan: Pergeseran Masalah Ketidakadilan

Analisis kebijakan yang mendalam menunjukkan bahwa zonasi telah berhasil mencapai Output yang dikehendaki (distribusi siswa), tetapi kegagalan pada Input Sumber Daya dan Proses Pedagogis telah menyebabkan pergeseran masalah ketidakadilan.

- Ketidakadilan Lama: Siswa miskin tidak bisa mengakses sekolah favorit (masalah akses).
- Ketidakadilan Baru: Siswa, baik kaya maupun miskin, yang berada di zona non-favorit, dipaksa untuk bersekolah di lingkungan yang tidak memiliki kualitas guru dan fasilitas setara dengan sekolah lain (masalah kualitas fungsional).

Kebijakan ini secara *de facto* bertindak sebagai alat diagnostik yang menyingkap defisit tata kelola pendidikan yang telah lama diidap. Defisit ini mencakup ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam memastikan pemerataan alokasi guru yang adil, serta kegagalan dalam mempersiapkan tenaga pendidik untuk menghadapi tuntutan pedagogis kelas abad ke-21. Solusi kebijakan harus berfokus pada tindakan afirmatif internal untuk mengatasi ketidakadilan baru ini.

SIMPULAN

Bahwa kebijakan zonasi SMA di Jakarta Barat berhasil mewujudkan pemerataan akses pendidikan secara struktural melalui distribusi siswa yang lebih merata dan pengurangan polarisasi sekolah favorit dan non-favorit; namun, kebijakan ini belum berhasil mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan secara fungsional. Kegagalan tersebut terutama disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru berkualitas, disparitas fasilitas antar-

sekolah, serta ketidaksiapan pedagogis dalam mengelola heterogenitas siswa yang meningkat drastis. Dampaknya, terjadi krisis pada dimensi proses pembelajaran, di mana tuntutan diferensiasi, asesmen diagnostik, dan adaptasi terhadap AKM belum sepenuhnya diimbangi oleh pelatihan dan dukungan sistemik bagi guru. Dengan demikian, zonasi efektif sebagai kebijakan pemerataan sisi akses (*demand-side policy*), tetapi masih lemah pada penguatan sisi suplai (*supply-side policy*) yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas proses pembelajaran. Untuk mencapai pemerataan yang substantif, diperlukan intervensi afirmatif pada redistribusi guru, peningkatan kompetensi pedagogis, dan penguatan tata kelola mutu pendidikan di tingkat sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. (2019). Pro dan kontra sistem zonasi sekolah dalam PPDB di Indonesia. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia>
- Kominfo. (2020). Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan pemerataan pendidikan nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id>
- Mustari, M. (2022). Implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(2), 120–134.
- Murniarti, E. (2020a). Analisis kebijakan pendidikan: Teori dan implementasi dalam konteks reformasi pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 85–97.
- Murniarti. (2020b). Analisis kebijakan pendidikan mencakup dimensi input, proses, dan output/outcome.
- Raharjo, S., dkk. (2020). Kebijakan zonasi dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(1), 45–58.
- Setiawan, A., & Rahaju, T. (2021). Dampak kebijakan zonasi terhadap kualitas input siswa dan pemerataan sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 6(3), 201–215.
- Sibagariang, H., Sihotang, H., & Murniarti, E. (2021a). Perspektif Merdeka Belajar dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui kebijakan zonasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 12–25.
- Sibagariang, S., Sihotang, H., & Murniarti. (2021b). Kebijakan zonasi dalam kerangka Merdeka Belajar sebagai strategi pemerataan berbasis wilayah.
- Supriadi. (2023a). Ketimpangan distribusi guru berkualitas pada implementasi sistem zonasi sekolah di wilayah metropolitan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pendidikan*, 8(2), 150–165.
- Supriadi. (2023b). Distribusi guru dan ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah metropolitan.
- Syakarofath, N. A., dkk. (2020). Problematika implementasi kebijakan zonasi sekolah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 26(4), 310–322.
- Taruklimbong, L., & Murniarti, E. (2024a). Tantangan kualitas pembelajaran SMA pasca kebijakan zonasi: Analisis pedagogical shock dan diferensiasi pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Menengah*, 12(1), 33–49.
- Taruklimbong, & Murniarti. (2024b). Pedagogical shock dan penerapan differentiated instruction dalam kelas heterogen.
- Tju, M., & Murniarti, E. (2021a). Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan kesiapan guru dalam penguatan literasi dan numerasi. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 90–104.
- Tju, & Murniarti. (2021b). Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran dan adaptasi pedagogis.